

KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SMART PROVINCE  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu perkembangan Teknologi Informasi saat ini adalah Smart City atau Smart Province. Teknologi informasi tersebut dikembangkan dengan konsep dasar untuk mewujudkan sebuah komunitas masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman. Sehingga perkembangan Teknologi Informasi akan berkembang dari perencanaan, penyusunan kebijakan dan pelayanan publik. Dengan perencanaan dan pelayanan yang semakin meningkat, dapat terselenggara pemerintahan yang kuat sehingga semakin dipercaya bahwa pemerintah semakin kreatif. Hal ini akan mendorong masyarakat berpikir positif untuk selalu meningkatkan produktifitas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi local.

Perkembangan kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah banyak yang berhasil mengembangkan teknologi informasi dengan konsep Smart City tersebut. Sistem yang berhasil dikembangkan juga dapat membantu pelayanan publik lebih mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam proses pengembangan tersebut. Layanan tersebut dapat terdiri dari informasi rawat inap rumah sakit, informasi tentang puskesmas, informasi kampung tematik, informasi produksi UMKM maupun informasi lainnya. Dengan pengembangan sistem aplikasi tersebut, masyarakat semakin terdorong untuk turut membantu menyempurnakan kekurangan tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Saat ini pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih diperlukan penyempurnaan yang terdiri dari mekanisme pelayanan informasi, sistem aplikasi pelayanan publik maupun perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi yang baru. Informasi yang dihasilkan dari pengembangan konsep dasar Smart Province berbasis elektronik dapat menjadi dasar pijakan penentu kebijakan untuk menentukan keputusan yang harus diambil sebagai respon terhadap keluhan masyarakat.

Dengan Pengembangan dan pengelolaan Smart Province di Jawa Tengah diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan dukungan Teknologi Informasi. Disamping itu ketersediaan Sumber Daya Manusia juga sangat mempengaruhi pengembangan Smart Province, oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan SKPD di Jawa Tengah maupun dengan Kabupaten/Kota agar pelayanan publik lebih sesuai harapan masyarakat.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province berbasis Elektronik adalah agar pelayanan publik lebih interaktif antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah.

Sedangkan tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya Sistem Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang lebih efisien dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama layanan melalui teknologi informasi yang lebih hemat biaya, hemat energy serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi DJawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

## II. SASARAN KEGIATAN

### a. Indikator Keluaran

Sasaran Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Smart Province adalah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan Smart Province berbasis elektronik berbentuk Sistem Aplikasi yang mendukung pengembangan dimensi Smart Province yang terdiri Smart Environment, Smart Society dan Smart Economy. Sistem aplikasi tersebut akan menjadi role model pengembangan aplikasi pendukung Smart Province berikutnya.

### b. Indikator Hasil

Dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan Pengelolaan Smart Province diharapkan dapat memberikan hasil tentang pengembangan Sistem Aplikasi Smart Province yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota.

## III. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province akan dilaksanakan oleh Bidang e-Government pada Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Rapat Koordinasi tentang Pengintegrasian Sistem Informasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan instansi Vertikal di Jawa Tengah;
- b. Pengembangan Sistem Aplikasi pendukung Smart Province dengan pembelian peralatan pendukung aplikasi;
- c. Perjalanan Dinas dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province, yang terdiri dari koordinasi proses pengembangan dan pengelolaan Smart Province, Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan Smart Province, maupun fasilitasi pengembangan dan pengelolaan Smart Province di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### IV. BIAAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

#### V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Smart Province Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019.

Kepala Bidang E-Government

Drs. M. AGUNG HIKMATI, M.Si  
NIP. 19710501 199101 1 001